

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, F. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. . In *Bandung: Cv Pustaka Setia*
- Dwiyanto, A. (2005). Reformasi Tata Pemerintahan. In *Yogyakarta: Gava Media*.
- Fitzsimmons, J. & M. (2006). Service Manajemen International Edition (5th ed.). In *NewYork, Amerika : The MCGraw.Hill Companies*.
- Harmon, M. M. , & R. T. M. (2014). Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik. In *Bantul: Kreasi Wacana*.
- Ibrahim, A. (2008). Teori Dan Konsep Pelayanan Public Serta Implementasinya. In *Jakarta: Mandar Maju* (p. 4).
- Miles, M. B. & H. A. M. (1984). *Qualitative data analysis*. Sage Publishing.
- Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik. In *Bandung : Alfabeta*.
- Nugroho, R. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. In *PT Elex Media Komputindo. Jakarta*.
- Nurcholis, H. (2005). Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. In *Jakarta: Grasindo*.
- Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik. In *Alfabeta, Bandung*.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: Cv Sah Media.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*.
- Ratminto Dan Atik Septi Winarsih. (2005). Manajemen Pelayanan. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Sellang, K. (2016). Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya. In *Yogyakarta: Penerbit Ombak*.
- Siagian, S. P. (1992). *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. .
- Sinambela, L. P. (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. In *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Bandung: Penerbit Alfabeta*.
- Tahir. A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Bandung : Alvabeta*.
- Tead, O. (1951). *The Art of Administration*. New York: McGrawHill. .
- Winter, S. C. (2003). The SAGE Handbook of Public Administration, Second Edition. In *SAGE Publications: Los Angeles*.
- Zeithaml, V. P. A. and L. B. L. (1985). Problems and Strategies in Services Marketing. In *Jurnal of Marketing Vol. 49. (Spring)*.

Jurnal :

- Alaina, F., Zuheri, & Aditya Candra. (2025). Tingkat Kepuasan Pasien Dalam Implementasi Rekam Medik Elektronik (RME) di Puskesmas Simpang Tiga Aceh Besar. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(4), 1814–1825. <https://doi.org/10.61579/future.v3i4.635>
- Amin, M. , & S. W. (2021). Implementasi Rekam Medik Elektronik: Sebuah Studi Kualitatif. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi. (Jatisi) Vol 8. No. 1 Maret 2021*.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*.
- Bakti Alphalah Ilham Cahaya, R., Hayati, R., Setiandari, E. LO, Yusida, H., Kesehatan Masyarakat, F., & Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, U. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Rekam Medis Elektronik (RME) di Puskesmas Cempaka Kota Banjarmasin Tahun 2025. In *Health Research Journal of Indonesia (HRJI) (Vol. 4, Number 2)*.

- Jordan, A. , & J. H. (2024). Faktor Penghambat Digitalisasi Rekam Medis di UPTD Puskesmas Tanjung Isuy Kutai Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4015-4020.
- Khasanah, L., & Budiyaniti, N. (2023). Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas Wilayah Kota Cirebon Tahun 2021. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 192–201.
- Medis, R., Mulyana, E., Situmorang, M., Wulandari, S., Awal, S., & Batam, B. (n.d.). IMPLEMENTASI DIGITALISASI REKAM MEDIS UNTUK MENDUKUNG. *Journal of Sustainable Community Service*, 1(4), 220–227. Retrieved <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JSCS>
- Muchlis, H. A. (2024). Model Sukses Implementasi Rekam Medis Elektronik di Puskesmas DKI Jakarta. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 12(01), 31–41. <https://doi.org/10.47007/inohim.v12i01.561>
- Naditya R., A. S. M. R. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1086–1095.
- Rosida Sapriani Harap, A. D. M. N. A. A. D. F. A. N. F. A. P. S. H. P. (2024). Implementasi Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik Untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Didaerah Terpencil. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 13(2), 316-322.
- Sabrina Sudarta, C., Dwi Nur Aini, N., Diansyah, B. D., Studi D-IV Manajemen Informasi Kesehatan, P., Panti Waluya Malang, Stik., Sabrina Sudarta STIKes Panti Waluya, C., Jl Yulius Usman No, M., & Timur, J. (2026). ANALISIS PENERAPAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) MENGGUNAKAN METODE HOT-FIT DI PUSKESMAS CIPTOMULYO. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 1(1), 29–34.

Undang-Undang :

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004. (2004). *Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat*.
- Menteri Kesehatan. (2019). *Nomor 43 Tahun Pusat Kesehatan Masyarakat*.

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon. (2022a). *Nomor 96 Tahun tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk sektor kesehatan.*

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon. (2022b). *Nomor 123 Tahun 2022 yang mengatur sistem pelayanan berbasis elektronik di rumah sakit.*

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon. (2022c). *Nomor 129 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan, serta didukung oleh kebijakan internal di masing-masing Puskesmas. .*

Peraturan Presiden. (2018). *Nomor 95 Tahun, yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. .*

Permenkes. (22 C.E.). *No. 24 Tahun mengatur tentang Rekam Medis, mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk menerapkan Sistem Rekam Medis Elektronik (RME).*

Permenkes No. 24. (2022). *Mengatur kewajiban seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Indonesia untuk menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) guna mendukung transformasi digital, keamanan, dan efisiensi layanan.*